

**PENYELEWENGAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009 DI KECAMATAN BENGKALIS  
KABUPATEN BENGKALIS (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



**OLEH :**  
**MUHAMMAD FAISAL**  
**10324023167**

**PROGRAM S1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field reseach) dengan judul Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Fiqh Siy sah), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelewengan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Penyelewengan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang di peroleh selama penelitian berlangsung kemudian di proses dan di analisis lebih lanjut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 115 orang. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel di ambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu Sehingga semua subjek dianggap sama untuk menjadi sampel.

Hasil dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang telah di amanatkan di dalam Undang-undang tidak berjalan secara maksimal, terbukti dari temuan-temuan pelanggaran baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terdapat faktor penghambat yaitu, terbatasnya dana, sumber daya manusia dan adanya intervensi pihak tertentu. Tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam tinjauan fiqih siyasah mencerminkan perbuatan dalam menegakkan *amar ma'r f nahi munkar*. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan *Wil yah al-Hisbah*, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Pokok Permasalahan .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Geografis / Luas dan Letak Wilayah .....	15
B. Demografi Kecamatan Bengkalis .....	17
C. Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bengkalis .....	22

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)**

A. Sejarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum .....	24
B. Pengertian Panitia Pengawas Pemilihan Umum .....	25
C. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum .....	30
D. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan .....	32
E. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	49
F. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilu Legislatif .....	50
G. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) .....	54

**BAB IV :Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas  
Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis Tinjauan Menurut Fiqih Siyasah**

A. Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	65
B. Faktor-Faktor Penghambat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	85
C. Pandangan Fiqih Siyasah Mengenai Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	90

**BAB VI : Kesimpulan dan Saran**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu, Menurut undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan bahwa pengawas pemilihan umum untuk ditingkat pusat dinamakan dengan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sedangkan untuk panitia pengawas pemilu ditingkat provinsi disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu Provinsi), ditingkat Kabupaten/Kota disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu Kabupaten/Kota), ditingkat Kecamatan disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan), dan untuk ditingkat desa disebut Panitia Pengawas lapangan.

Tujuan diadakannya pengawasan pemilihan umum legislatif adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu/Panwaslu harus mengawasi setiap tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 BAB II pasal 4 ayat 2, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:<sup>1</sup>

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran peserta pemilu; penetapan peserta pemilu;
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Masa kampanye ;
6. Masa tenang;
7. Pemungutan dan penghitungan suara;
8. Penetapan hasil pemilu; dan
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Paragraf 4: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasal 80 Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:<sup>2</sup>

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:

---

<sup>1</sup> Undang-undang R.I No. 10 Tahun 2008 Tentang *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

<sup>2</sup> Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2007, *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), h. 328-329

- a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. Pelaksanaan kampanye;
  - c. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
  - d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - e. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  - f. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
  - g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
  4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
  6. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 81 mengatur tentang kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan berkewajiban:<sup>3</sup>

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menyampaikan laporan kepada panwaslu kabupaten/kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan;
3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya kepada panwaslu kabupaten/kota;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada panwaslu kabupaten/kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rumus tugas tersebut Pengawas Pemilu merupakan salah satu institusi penegak hukum dalam pemilu. oleh karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu dari pusat hingga kecamatan harus memahami dan mengerti seluruh materi dan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu karena materi dan perundangan-undangan itulah yang harus dijaga dan ditegakkan oleh pengawas pemilu agar pemilu terlaksana secara demokratis, jujur dan adil.

---

<sup>3</sup> *Ibid*



Dengan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu oleh badan pengawas yang independen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. oleh karena itu Panwaslu harus berlaku adil kepada seluruh peserta pemilu baik kepada partai-partai maupun perseorangan yang ikut dalam pemilu tersebut, salah satu amanat dalam UU No.22 tahun 2007 adalah Panwaslu harus bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat. Al-Maidah Ayat 8<sup>4</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS: Al-Maidah:8)

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu / Panwaslu di kategorikan kedalam aktivitas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sesuai hadits Rasulullah saw<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), cet. ke-1, h. 108

<sup>5</sup> Diterjemahkan Oleh Abu Azka, *Syarah 40 Hadits Tentang Ahlak*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2003), h. 20

سعيد عنه : عليه  
 يقول : فليغيره بيده, يستطع فبلسانه, يستطع فبقليه,  
 الإيمان

Artinya: *"Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka, hendaknya ia ubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hati; dan ini adalah selemah-lemahnya iman."*(HR. Muslim).

Panwas yang kredibel mestinya tak hanya dimaknai sekadar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan kepihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu , pihak pengawasan harus di fungsikan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang *luber dan jurdil* bisa dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dari pusat hingga kecamatan, memiliki peran strategis, karna lembaga ini bertugas menjamin pemilu dilakukan secara demokratis<sup>6</sup>.

Akan tetapi pada kenyataannya pemilihan umum legislatif 2009 di Indonesia banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu yang dilakukan para peserta pemilu baik Partai politik maupun individu-individu yang ikut pemilu, ini membuktikan bahwa

---

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39

lemahnya fungsi pengawasan dalam Pemilihan Umum dan kurang tegasnya Panwaslu dalam mengawasi kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang menyelenggarakan pemilu legislatif 2009 sama halnya dengan kecamatan lain yang ada di Indonesia, juga banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009, seperti:

1. Pelanggaran administrasi :

- a. Kampanye Lewat Waktu
- b. Perubahan jenis kampanye
- c. Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi & keluar jalur

2. Pelanggaran tindak pidana pemilu :

- a. Pelibatan anak-anak dalam kampanye.
- b. Kampanye diluar jadwal
- c. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
- d. Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan dalam kampanye
- e. Politik uang.
- f. Penggunaan lembaga-lembaga pendidikan dan sarana ibadah dalam kampanye.

Dalam setiap pemilu baik pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah baik Kabupaten/Kota maupun provinsi, Panwaslu mempunyai peranan yang sangat mempengaruhi sekali terhadap hasil pemilu yang lebih baik, akan tetapi persoalan pelanggaran dalam pemilu sering kali terjadi dalam pelaksanaan pemilu,

maka kami merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti karna itu penelitian ini kami beri judul **PENYELEWENGAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009 DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS (TINJAUAN FIQH SIYASAH)**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini diarahkan pada penyelewengan tugas dan wewenang panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## **C. Pokok Permasalahan**

- a. Bagaimana penyelewengan tugas dan wewenang panwaslu dalam mengawasi pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
- b. Apa faktor-faktor penghambat Panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2009 dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
- c. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap tugas dan wewenang Panitia pengawas pemilihan umum dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bengkalis?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelewengan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi Pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
- c. Untuk Mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bengkalis dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembaca akademika dan intelektual
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. penulis tertarik untuk melakukan penelitian disini karena ada permasalahan yang menurut pendapat penulis sangat penting mengenai pemilu legislatif 2009, yang mana dalam pengawasan pemilu tidak berjalan dengan maksimal terbukti dengan adanya pelanggaran baik yang bersifat pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu yang tidak tersentuh oleh hukum.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang termasuk subjek dalam penelitian ini adalah Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bengkalis dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penyelewengan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Panwaslu Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 3 orang, dan Panitia Pengawas Lapangan yang ada di 20 desa di Kecamatan Bengkalis 20

orang, Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah 5 orang, pimpinan partai politik yang ada di Kecamatan Bengkalis sebanyak 38 partai politik dan masyarakat Kecamatan Bengkalis berjumlah 69.537 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

**TABEL I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Anggota Panwaslu kecamatan	3	3	2.61
2	Anggota Pengawas Lapangan	20	5	4.35
3	Pimpinan Partai Politik	38	7	6.08
4	Masyarakat	69.537	100	86.96
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Metoda pengambilan sampel diambil dengan metode Purposive Sampling.

#### 4. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer diambil langsung dari wawancara dan angket yang disebarkan kepada responden yang berkaitan dengan penyelewengan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti: Buku-buku, data dan arsip Panwaslu Kecamatan Bengkalis, internet, majalah/surat kabar, jurnal dan refrensi lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Penulis melakukan Tanya jawab secara langsung, kepada responden yang dianggap mengerti dan mengetahui dengan permasalahan yang akan diteliti

### b. Kuisisioner

Adalah daftar pertanyaan sekilas penelitian yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden untuk pelengkap hasil penelitian ini.

## 6. Analisis Data Analisa kualitatif yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang di peroleh selama penelitian berlangsung kemudian diproses dan di analisis lebih lanjut kedalam kategori.

## 7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari arah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.



## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I      Pendahuluan:**

Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II      Gambaran Umum Lokasi Penelitian:**

Bab ini akan dibahas tentang, geografis / luas dan letak wilayah, demografi Kecamatan Bengkalis, daftar pemilih tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bengkalis, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bengkalis.

### **BAB III    Tinjauan Umum Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum:**

Bab ini akan dibahas tentang Sejarah Panitia pengawas Pemilu, tugas dan wewenang, mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan, pemilu legislatif dalam islam serta pandangan fiqih siyasah tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

### **BAB IV    Penyelewengan Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah:**

Bab ini akan dibahas tentang penyelewengan tugas dan wewenang Panitia pengawas pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, faktor-faktor penghambat dalam

pengawasan pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dan Pandangan Fiqih Siyasah tentang penyelewengan tugas dan wewenang Panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB V    Kesimpulan dan Saran:**

Pada Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari berbagai pembahasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis, Luas dan Letak Wilayah**

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Bengkalis 514 KM<sup>2</sup>, Kecamatan Bengkalis merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis.

Iklim di Kecamatan Bengkalis beriklim tropis, curah hujan dan musim kering boleh dikatakan seimbang sepanjang tahun, dimana musim hujan lebih banyak pada bulan September sampai bulan Desember.

Letak kecamatan Bengkalis berbatasan dengan:

1. Utara berbatasan dengan : Kecamatan Bantan
2. Selatan berbatasan dengan : Selat Bengkalis
3. Barat berbatasan dengan : Selat Melaka
4. Timur berbatasan dengan : Selat Melaka.

Sebagai Kecamatan yang luas, Kecamatan Bengkalis terdiri dari 3 Kelurahan dan 17 Desa. Jarak antara desa terjauh dengan Kecamatan 60 KM. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL II. 1**  
**Nama-Nama Desa / Kelurahan di Kecamatan Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>	<b>Desa / Kelurahan</b>
1	Kota Bengkalis	Kelurahan
2	Damon	Kelurahan
3	Rimba Sekampung	Kelurahan
4	Kelapapati	Desa
5	Pedekik	Desa
6	Pangkalan Batang	Desa
7	Sebauk	Desa
8	Teluk Latak	Desa
9	Meskom	Desa
10	Senggoro	Desa
11	Air Putih	Desa
12	Sungai Alam	Desa
13	Penampi	Desa
14	Tameran	Desa
15	Penebal	Desa
16	Pematang Duku	Desa
17	Ketam Putih	Desa
18	Kelemantan	Desa
19	Sekodi	Desa
20	Wonosari	Desa

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

## B. Demografi Kecamatan Bengkalis

**TABEL II. 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Laki-laki/orang	Perempuan/orang	Jumlah/Jiwa
1	35.434	34.103	69.537

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari perkembangan jumlah penduduk tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Bengkalis penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan yaitu penduduk laki-laki 35.434 jiwa dan perempuan 34.103 jiwa.

**TABEL II. 3**  
**Jumlah Penduduk menurut Suku atau Etnis**

No	Suku atau Etnis	Jumlah/Jiwa
1	Melayu	41.958
2	Jawa	12.031
3	China	6.804
4	Minang	2.305
5	Suku Asli	2.162
6	Batak	850
7	Bugis	583
8	Lainnya	954
Jumlah		67.647

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa suku melayu lebih dominan di bandingkan dengan suku-suku yang lainnya suku melayu sebanyak 41.958 dan selanjutnya yaitu suku jawa sebanyak 12. 031, selanjutnya suku/ etnis cina sebanyak 6. 804, selanjutnya suku minang sebanyak 2.305, selanjutnya suku Asli 2.162, selanjutnya suku bugis sebanyak 583 dan yang terakhir adalah suku-suku yang tidak terlalu banyak akan tetapi mereka ada dan terdaftar sebagai masyarakat di kecamatan bengkalis di gabungkan sebanyak 954 jiwa.

**TABEL II. 4**  
**Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	12.670
2	Pedagang	3.797
3	Peternak	5.499
4	Pengrajin	649
5	PNS/TNI/POLRI	5.269
6	Wira Swasta	6.032
7	Nelayan	1216
8	Buruh	3.832
9	Pensiunan	379
10	Lainnya	4.786
<b>Jumlah</b>		<b>43.750</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Bengkalis bekerja sebagai petani berjumlah 12.670

**TABEL II. 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum Sekolah	8.327
2	TK	1.189
3	Tidak Tamat SD	5.800
4	SD	17.015
5	SLTP	8.575
6	SLTA	13.163
7	SMK	2.263
8	D I	417
9	D II	755
10	D III	738
11	D IV / S I	1.474
12	S2	311
13	S3	3
14	Buta Huruf	318
<b>Jumlah</b>		<b>60.348</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari perbandingan tersebut menunjukan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bengkalis menurut pendidikan yang lebih banyak adalah masih sekolah dasar sebanyak 17.015 orang dan masih ada masyarakat di Kecamatan Bengkalis yang buta huruf sebanyak 318 orang.

**TABEL II. 6****Jumlah Penduduk menurut Usia**

<b>No</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1	1 – 10	13. 551
2	11 – 20	13. 451
3	21 – 30	24. 392
4	31 – 40	19. 510
5	41 – 50	8. 099
6	51 – 60	6. 114
7	61 > Keatas	4. 231
<b>Jumlah</b>		<b>89. 348</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari rincian tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Bengkalis yang berumur 21 – 30 tahun merupakan penduduk yang paling banyak dengan jumlah 24. 392 orang. Sedangkan penduduk Kecamatan Bengkalis yang paling sedikit yaitu berkisar dari umur 61 tahun keatas dengan jumlah hanya 4.231 orang. Dengan demikian bahwa generasi muda yang akan meneruskan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di kecamatan Bengkalis lebih banyak dibandingkan generasi yang sudah tua.



**TABEL II. 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	60.325
2	Khatolik	704
3	Protestan	626
4	Hindu	-
5	Budha	8.604
<b>Jumlah</b>		<b>70.259</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis

Dari tabel di atas sangat jelas diketahui bahwa penduduk Kecamatan Bengkalis mayoritas memeluk agama Islam yang berjumlah 60.325 orang. Sedangkan penduduk yang memeluk agama Budha berjumlah 8.604, selanjutnya penduduk yang memeluk agama khatolik sebanyak 704 orang, sedangkan penduduk yang memeluk agama Protestan berjumlah 626 orang. Sementara penduduk yang memeluk agama Hindu tidak ada.

**C. Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) di  
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

**TABEL II. 8**

**Daftar Pemilih Tetap Dan Jumlah TPS Menurut Kelurahan Dan Desa**

<b>No</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>Jumlah TPS</b>
1	Kota Bengkalis	3297	12
2	Damon	3655	14
3	Rimba Sekampung	3592	11
4	Kelapapati	4249	15
5	Pedekik	1449	5
6	Pangkalan Batang	2317	10
7	Sebauk	1396	6
8	Teluk Latak	1543	6
9	Meskom	2424	8
10	Senggoro	3398	8
11	Air Putih	1564	6
12	Sungai Alam	2850	9
13	Penampi	1310	5
14	Tameran	1866	6
15	Penebal	1159	4
16	Pematang Duku	2074	7
17	Ketam Putih	1851	7
18	Kelemantan	1123	4
19	Sekodi	1720	5
20	Wonosari	3686	14
<b>Jumlah</b>		<b>46. 523</b>	<b>162</b>

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Bengkalis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih kecamatan bengkalis terbanyak di desa Kelapapati yang berjumlah 4.249 orang yang berada di 15 TPS di desa Kelapapati, sedangkan jumlah pemilih yang paling sedikit di desa Kelemantan yang berjumlah 1.123 orang yang berada di 4 TPS di Desa Kelemantan.

Jumlah pemilih sangatlah penting dalam pemilihan umum ini adalah dasar dari pemilihan umum, mereka (pemilih) yang akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka yang akan datang.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG**

#### **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

##### **A. Sejarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)**

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di Kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.<sup>7</sup>

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.<sup>8</sup>

Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982,

---

<sup>7</sup> <http://www.bawaslu.go.id/ProfilBawaslu/SejarahPengawasanPemilu/tabid/93/Default.aspx>, di akses pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010

<sup>8</sup> *Ibid*

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.

## **B. Pengertian Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)**

### **1. Pengertian Panitia**

Panitia merupakan sejumlah orang yang disertai tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu<sup>9</sup>.

### **2. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah penjagaan kepentingan rakyat, badan atau dewan yang melakukan suatu pekerjaan atau urusan<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, (Bandung, Angkasa: 1996), cet. ke-1, h. 179

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2006), cet. ke-2, h. 223

Prajudi Atmosudirjo menyatakan pengawasan adalah keseluruhan dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan kita untuk menjamin atau membuat agar supaya semua pelaksanaan dan penyelenggaraan berlangsung secara berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan dan dikomandokan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Soewarno Hadiningrat Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya.<sup>12</sup>

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan baik langsung maupun tidak langsung yaitu dalam proses dari bahan baku sampai barang jadi yang tidak terlepas dari penyimpangan atau kesalahan. suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang merupakan suatu kegiatan yang sangat positif dimana dalam pengawasan tersebut terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada penetapan standar, perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari suatu kegiatan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana, baik sebelum maupun sesudah rencana itu dilaksanakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Moekijat, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Bandung, Mandar Maju: 2000), cet. ke-1, h. 55

<sup>12</sup> Soewarno Hadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1985), cet. ke-1, h. 7

Bidang pengawasan adalah suatu bidang yang didasarkan atas kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan azas-azas demokrasi, pemilu biasanya dilaksanakan di negara-negara demokratis, kemudian Karena ini dianggap cara yang paling baik sebagai sarana menyampaikan aspirasi rakyat.<sup>14</sup>

pemilihan umum merupakan pemilihan untuk memilih anggota lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat seperti yang telah ditetapkan undang-undang<sup>15</sup>.

### 4. Pengertian Pengawas Pemilihan Umum

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu LuarNegeri. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang

---

<sup>13</sup> Panwas Pemilu, *Buku Saku Pedoman Operasional Pengawas Pemilu 2004*, (Jakarta, 2004), tidak dipublikasikan

<sup>14</sup> Drs. Ahmad A. K. Muda, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Reality Publisher: 2006), cet. ke-2, h. 299

<sup>15</sup> Zainul Bahri, *op.cit.*, h. 181

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Panwaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. jadi realisasi tugas yang ada pada Panwaslu merupakan pelaksanaan tugas panwaslu dalam mengawasi seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.<sup>17</sup>

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dihimpun oleh Mulayana W. Kusuma, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, (Jakarta: Opsi Consultant DAN 7 (Seven) Strategic Studies, 2008), lihat dalam Bab I Pasal 1

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*



Pengawasan yang dilakukan Panwaslu di kategorikan sebagai Pengawasan fungsional yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai Tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan melalui investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau agar penyelenggaraan dalam pemilu sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengingat pemilu mempunyai arti yang sangat penting maka perlu diadakan pengawasan agar dapat berjalan secara demokratis, pengawasan ini tidak hanya dimaknai sebagai mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran, lebih dari itu, pengawasan harus di fungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu yang *luber dan jurdil* bisa dilakukan secara konsisten.

Pada dasarnya ada tiga hal tujuan pemilihan umum yakni sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.

---

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), cet. ke-4, h. 182

2. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integarsi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasi masyarakat dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

### **C. Tugas Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)**

Dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu/Panwaslu harus mengawasi setiap tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 BAB II pasal 4 ayat 2, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran peserta pemilu; penetapan peserta pemilu;
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Masa kampanye ;
6. Masa tenang;
7. Pemungutan dan penghitungan suara;
8. Penetapan hasil pemilu; dan

9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Paragraf 4: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasal 80 Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah<sup>21</sup>:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
  - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. Pelaksanaan kampanye;
  - c. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
  - d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - e. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  - f. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
  - g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

---

<sup>20</sup> Lihat *UU No. 10 Tahun 2008 BAB II pasal 4 ayat 2*

<sup>21</sup> Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2007, *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), h. 328

4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
6. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

**D. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan.**

Pengawasan Pemilu terdapat tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:<sup>22</sup>

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - a. Tujuan Pengawasan Pemuktahiran data pemilih:
    - 1) Memastikan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk Memilih terdaftar sebagai Pemilih;
    - 2) Memastikan seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih;

---

<sup>22</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2009 *Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009*

- 3) Memastikan bahwa Pemuktahiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup Pengawasan pemuktahiran data pemilih meliputi:

- 1) Proses pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap .
- 2) Pengolahan/pemindahan data pemilih sementara oleh PPDP dan PPS di tingkat Kelurahan/Desa berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 800 (delapan ratus) orang untuk setiap TPS;
- 3) Sosialisasi pemutakhiran DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain.
- 4) Memastikan PPS mengumumkan DPS hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama 7 (tujuh) hari di tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat perbaikan masukan dari masyarakat.<sup>23</sup>

c. Proses Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih sementara

- 1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi kegiatan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan:<sup>24</sup>
  - a) Adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia 17 tahun;
  - b) Adanya pemilih yang telah memenuhi persyaratan pasal 3 huruf a yang belum terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, pasal 3

<sup>24</sup> *Ibid*, pasal 6. ayat 1

- c) Adanya calon pemilih yang telah meninggal dunia;
  - d) Adanya calon pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e) Adanya calon pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau adanya kemungkinan perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil/ purnabakti yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
  - f) Adanya kesalahan penulisan identitas pemilih;
  - g) Adanya penulisan ganda calon pemilih.
- 2) Pengawas Pemilu Lapangan mencatat keberatan masyarakat terhadap daftar pemilih tetap dan melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
- 3) Proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat nasional.
- a) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
  - b) Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan daftar pemilih tetap kepada KPUD

- Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan Bawaslu mengawasi penyampaian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
- Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyampaian DPT oleh PPK dan PPS
- Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.<sup>25</sup>

d. Strategi pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya berikut:<sup>26</sup>

- 1) Mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemuktahiran data pemilih;
- 2) Menentukan fokus pengawasan pada hal-hal yang rawan terjadinya pelanggaran, antara lain:
  - a) Adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia 17 tahun;
  - b) Adanya pemilih yang telah memenuhi persyaratan pasal 3 huruf a yang belum terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih;
  - c) Adanya calon pemilih yang telah meninggal dunia;
  - d) Adanya calon pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e) Adanya calon pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau adanya kemungkinan perubahan status anggota

---

<sup>25</sup> *Ibid*, pasal 6. Ayat 2

<sup>26</sup> *Ibid*, pasal 10

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil/ purnabakti yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;

- f) Adanya kesalahan penulisan identitas pemilih;
  - g) Adanya penulisan ganda calon pemilih.
- 3) Mengajak dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat, RT/RW setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemuktahiran data pemilih.
  - 4) Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius, antara lain dengan mengajukan koreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan dan menghimbau masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan.
  - 5) Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada saat proses pemuktahiran data pemilih;
  - 6) Berkoordinasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Pengawas Pemilu di tingkat atasnya.
2. Pengawasan dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Sasaran pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai bahwa pelaksana, petugas, peserta, waktu, jadwal, tempat, materi, jumlah peserta, serta prosedur pelaksanaan kampanye adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.<sup>27</sup>

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye yang meliputi pengawasan atas materi dan metode kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.

a. Pengawasan atas aspek-aspek pelaksanaan kampanye tersebut di atas dilakukan dalam setiap metode pelaksanaan kampanye sebagai berikut:

- 1) Pertemuan terbatas;
- 2) Pertemuan tatap muka;
- 3) Media massa cetak dan media massa elektronik;
- 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- 6) Rapat umum; dan
- 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mendatangi tempat pelaksanaan kampanye;

---

<sup>27</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 Tentang *Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

<sup>28</sup> *Ibid*, pasal. 4

- 2) Mendatangi tempat terjadinya dugaan pelanggaran;
  - 3) Menggali informasi dari penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait;
  - 4) Menjalin kerjasama dengan pemantau Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya;
  - 5) Merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye Pemilu;
  - 6) Meminta informasi kepada Peserta Pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye;
  - 7) Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye yang dilaporkan/ditemukan dan terbukti;
  - 8) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.<sup>29</sup>
3. Pengawasan dalam Kegiatan Perlengkapan Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan tugas dan tanggung-jawab Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan jumlah, jenis, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lainnya yang ditetapkan oleh KPU.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, pasal. 5

Perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagai pendukung, yang meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.<sup>30</sup>

Sesuai dengan amanat Pasal 147 UU Nomor 10 Tahun 2008, pengawasan atas pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara tersebut di atas merupakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, mulai dari Bawaslu sampai Pengawas Pemilu Lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### a. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara bertujuan untuk menjamin proses pengadaan dan

---

<sup>30</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:<sup>31</sup>

- 1) Tepat jenis;
- 2) Tepat spesifikasi teknis;
- 3) Tepat kualitas;
- 4) Tepat jumlah;
- 5) Tepat waktu;
- 6) Tepat prosedur;
- 7) Tepat anggaran; dan
- 8) Tepat sasaran.

b. Ruang Lingkup Pengawasan

- 1) Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara meliputi pengawasan atas:
  - a) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara, serta pendukung perlengkapan pemungutan suara lainnya.
  - b) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- 1) Pengawasan atas pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan di tingkat penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, pasal. 2

- a) Pengawasan di tingkat KPU dilakukan untuk pengadaan surat suara, tinta, dan segel.
  - b) Pengawasan di tingkat KPU Provinsi dilakukan untuk pengadaan kotak suara, bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan.
- 2) Pengawasan atas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan di semua tingkatan penyelenggara Pemilu, dengan ketentuan:
- a) Pengawasan mulai dari tingkat KPU dilakukan untuk pendistribusian surat suara, tinta, dan segel.
  - b) Pengawasan mulai dari tingkat KPU Provinsi dilakukan untuk kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk memberi tanda pilihan, tempat pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, termasuk surat suara, tinta, dan segel yang didistribusikan dari tingkat KPU.<sup>32</sup>
- c. Fokus Pengawasan

Pengawasan atas pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan melihat, mengamati, memeriksa, mencatat, dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dengan fokus kepada:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, pasal. 4

<sup>33</sup> *Ibid*, pasal. 6

- 1) Jumlah setiap perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
- 2) Spesifikasi setiap perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
- 3) Semua perlengkapan pemungutan suara sudah berada pada titik-titik pengawasan sesuai dengan waktu yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
- 4) Semua perlengkapan pemungutan suara tepat sasaran sesuai dengan tempat peruntukannya.

d. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung dan mencatat ketersediaan seluruh perlengkapan pemungutan suara, baik pada tingkat pengadaan maupun di tempat peruntukan dan di jalur distribusi yang dilalui, yaitu: <sup>34</sup>

- 1) Pengawasan pengadaan dilakukan di tingkatan penyelenggara pemilu KPU dan KPU Provinsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan.
- 2) Pengawasan distribusi dilakukan pada simpul-simpul jalur distribusi dan peruntukan perlengkapan pemungutan suara secara berjenjang dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, pasal. 7

berkelanjutan, mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPK.

#### 4. Pengawasan pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara

##### a. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bertujuan untuk:<sup>35</sup>

- 1) Memastikan pemilih terlayani menggunakan suara dan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- 2) Memastikan terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- 3) Memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- 4) Mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

##### b. Ruang Lingkup Pengawasan

---

<sup>35</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009*, pasal. 3

1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan terhadap seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN, meliputi kegiatan:

- a) Persiapan pemungutan suara;
- b) Pelaksanaan pemungutan suara;
- c) Persiapan penghitungan suara; dan
- d) Pelaksanaan penghitungan suara;

2) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan dalam hal terjadi:

- a) Pemungutan suara ulang;
- b) Penghitungan suara ulang;
- c) Pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu lanjutan; dan
- d) Pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu susulan;<sup>36</sup>

3) Fokus Pengawasan

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan terhadap:<sup>37</sup>

- a) Kepatuhan KPPS terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
- b) Kesiapan KPPS dan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara di TPS;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, pasal. 5

<sup>37</sup> *Ibid*, pasal. 6



- c) Netralitas petugas penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara;
- d) Kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, terror, dan sabotase dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- e) Kemungkinan terjadinya politik uang (money politics) pada saat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f) Kemungkinan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh pejabat negara/pejabat pemerintah.

#### 5. Pengawasan Pada Kegiatan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

##### a. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertujuan untuk:<sup>38</sup>

- 1) Memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri, dan KPU dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 2) Memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 3) Mencegah terjadinya pengurangan dan/atau penggelembungan perolehan suara peserta Pemilu.

---

<sup>38</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Pengawasan Pergerakan Surat Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009*, pasal. 3

b. Ruang Lingkup Pengawasan

- 1) Pengawasan pergerakan surat suara dilakukan terhadap seluruh proses pergerakan surat suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.<sup>39</sup>

c. Fokus Pengawasan

Pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara difokuskan pada:<sup>40</sup>

- 1) Kepatuhan penyelenggara Pemilu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 2) Netralitas penyelenggara Pemilu dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 3) Kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 4) Kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

---

<sup>39</sup> *Ibid*, pasal. 5

<sup>40</sup> *Ibid*, pasal. 6

- 5) Kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 6) Kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap kotak suara, surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara;
  - 7) Akurasi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
  - 8) Penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.
- d. Proses Pengawasan Pada Kegiatan Pergerakan Surat Suara dari TPS ke PPK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan:<sup>41</sup>
- 1) Panwaslu lapangan
    - a) Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari KPPS kepada PPK melalui PPS.
    - b) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pergerakan surat suara dari TPS ke PPK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - Memastikan saksi yang hadir membawa surat mandat dari peserta pemilu;

---

<sup>41</sup> *Ibid*, pasal. 7

- Memastikan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara, sertifikat penghitungan suara, dan surat suara masih tersegel dengan baik;
- Kotak suara tersegel dengan isi sebagaimana dimaksud huruf b hanya boleh dibuka pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.
- Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan mengawasi pembuatan berita acara penyerahan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh PPS dan PPK.<sup>42</sup>

## 2) Panwaslu Kecamatan

- a) Panwaslu Kecamatan mengawasi seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan.
  - b) Panwaslu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan saksi peserta Pemilu yang hadir dalam mengawasi proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dengan memegang teguh asas netralitas.
- Panwaslu Kecamatan mengawasi pembuatan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yang ditandatangani anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani berita acara.

---

<sup>42</sup> *Op.cit*

- Panwaslu Kecamatan memastikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan di tempat umum yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- Panwaslu Kecamatan menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK.<sup>43</sup>

#### **E. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

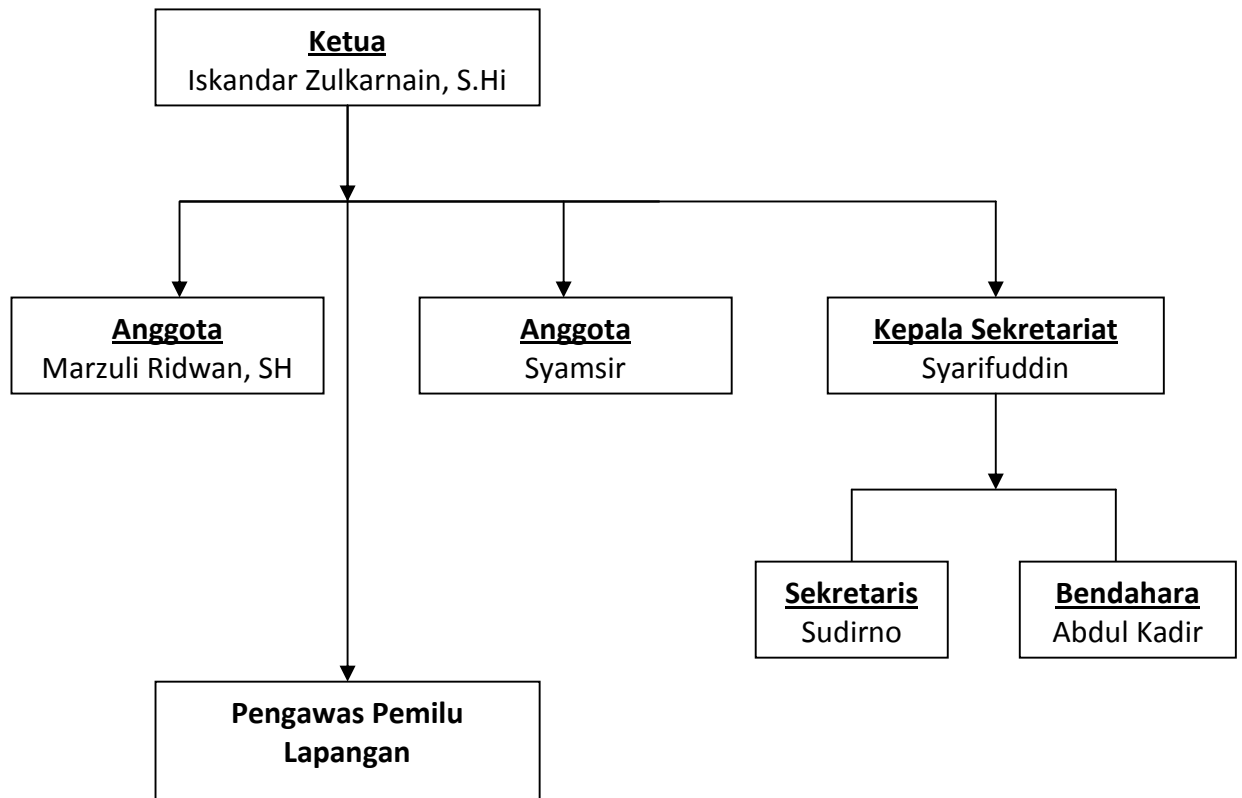
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis beralamat di Jl. Bengkalis Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis yang sebelumnya pada saat Pemilu Legislatif 2009 beralamat di Jl. Antara Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis.

Panwaslu Kecamatan Bengkalis di bentuk pada saat pemilu legislatif 2009 atas seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkalis dan memilih enam orang yang selanjutnya di uji kelayakan dan kepatutan oleh Panwaslu Kabupaten sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk di pilih tiga orang sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, pasal. 8 dan 9

### 1. Struktur Organisasi<sup>44</sup>



## E. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Umum Legislatif

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

<sup>45</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. ke-4, h. 22

## 2. Obyek Pembahasan Fiqih Siyasah

Obyek pembahasan fiqih siyasah secara garis besar adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>46</sup>

## 3. Pemilihan Umum dalam menurut Fiqih Siyasah

Dalam Islam persoalan pertama yang muncul setelah Nabi Muhammad Wafat pada 632 M / 10 H adalah proses. "Pertemuan para sahabat pada hari *saqifah* merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah umat Islam. Pada pertemuan itu telah diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat urgen bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif".<sup>47</sup>

Setelah melalui perdebatan yang alot antara Muhajirin dan Anshar maka terpilih Abu Bakar sebagai khalifah, dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Abu Bakar setelah dibai'at ia tidak memberikan janji-janji muluk dalam kepemimpinannya sebagai nakhoda baru dalam bathera

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>47</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet. ke-4, h.

Negara Madinah ia hanya menuntut kesetiaan dan kepatuhan ummat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar.<sup>48</sup>

Para Mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan—selain kelompok Syi'ah bersepakat bahwa jalan untuk mencapai kursi keimamahan adalah melalui pemilihan dan kemufakatan, artinya bukan melalui naskah wasiat atau penunjukan. Para ulama fiqh telah merumuskan secara legal formal dalam suatu rumusan yang berbunyi, “Sesungguhnya keimamahan itu identik dengan kontrak”. Kontrak keimamahan merupakan kontrak antara imam dan ummat. Sesungguhnya, tujuan akhir dari kontrak keimamahan ini adalah supaya kontrak ini menjadi sumber yang dijadikan landasan bagi seorang imam untuk memperoleh kekuasaannya.

#### 4. Pemilihan Umum Legislatif (*Ahlul Halli wal Aqdi*) Menurut Fiqih Siyasah

##### a. *Ahlul Halli wal Aqdi*

Secara bahasa, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul* yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Halli*, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merumuskan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh ak-khulafa*, (Kairo : Dar al-Nahdhah, t.tp. ) h. 247, lihat juga dalam Muhammad Iqbal, (*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*), (Gaya Media Pratama, Jakarta: tt), h. 66

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 137



Dengan kata lain, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. al-Mawardi menyebut *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan *ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *ahl al-Syawkah*, sebagian lagi menyebutnya dengan *ahl al-Sy ra* atau *ahl al-Ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-Ijtihad*.<sup>50</sup>

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Sy ra*. Pada masa khalifah yang empat, khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa shahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang shahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-Sy ra* atau *Ahlul Halli wal 'Aqdi* belum lagi berlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.<sup>51</sup>

Tugas daripada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* hanya terbatas pada dua hal, pertama, mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 138

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 138

yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

## **G.Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)**

### **1. Pengertian *Wilayah Al-Hisbah***

*Wilayah al-Hisbah* berasal dari kata *al-Wila'yah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.<sup>52</sup>

*Al-Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar*, menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban; fardhu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang di pandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang di angkat menjadi petugas al-hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara<sup>53</sup>.

Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi *Wila'yah al-Hisbah* yang kewenangannya

---

<sup>52</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1939

<sup>53</sup> A. Rahmat Rosyadi & M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 61

tidak termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan biasa dan *Wila'yah al-Ma'zolim*.<sup>54</sup>

Dasar hukum yang melandasi tugas-tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti *Wila'yah al-Hisbah*, cukup banyak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*<sup>55</sup>

Dan surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

<sup>54</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1939

<sup>55</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media 2005), cet, ke 1, h. 63

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di isi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada ada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.<sup>56</sup>

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian menurut kesepakatan ulama' fiqh, bentuk kewajiban amar ma'r f nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib 'ain (*inperatif*) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.

## 2. Sejarah Wilayah Al-Hisbah

Negara telah diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dapat dilihat pada masa Rasulullah di samping memperhatikan akhlak yang mulia, Rasulullah juga memperhatikan pelembagaan penegakan dan pelestarian dengan memerintahkan setiap

---

<sup>56</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 170

orang untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam sejumlah hadist nabi diriwayatkan selalu menekankan peran ini bagi setiap muslim. Beliau sendiri, seringkali melakukan inspeksi pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak, setiap kali beliau menemukan orang yang melakukan kecurangan, beliau pasti melarangnya.

Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai *al-Muhtasib* pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, beliau menunjuk sahabat Sa'ad ibn al-'Ash ibn Umayyah sebagai *al-Muhtasib* di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah.<sup>57</sup>

Tindakan Rasulullah SAW dalam mendelegasikan tugas *al-Hisbah* kepada para sahabat dianggap oleh ulama' fiqh sebagai cikal bakal *Wilayah al-Hisbah*. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pelanggar kasus *al-Hisbah* kepada sahabat memberikan isyarat bahwa kasus-kasus yang terkait dengan *amar ma'ruf nahi munkar* perlu ditangani secara serius.

Penanganan kasus *al-Hisbah* di zaman Abu Bakar as-Siddiq tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sekalipun kadang-kadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan

---

<sup>57</sup>, Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004) h.

secara tegas mulai dilakukan. Untuk *Wilayah al-Hisbah*, Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang al-Muhtasib, antara lain Sa'ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Ummi Asy- Syifa' (wanita) yang disebut terakhir sebagai *al-Muhtasibah* untuk mengawasi para pedagang di pasar Madinah.<sup>58</sup>

Secara umum lembaga *Wilayah al-Hisbah* berlanjut hingga pada masa dinasti Umayyah (661-750), *Wilayah al-Hisbah* pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Setelah Daulah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M-1225 M (132 H-656 H), keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (*qadla'*).<sup>59</sup>

Demikian pula *Wilayah al-Hisbah* menjadi departemen penting selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, meski departemen *Wilayah al-Hisbah* yang resmi tidak ada, namun selama masa kesultanan, *al-Muhtasib* dan *qadli* sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah baru yang dikuasai oleh Negara.

---

<sup>58</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op cit*, h. 1940

<sup>59</sup> Jurnal Studi Islam dan Budaya, *Wilayah Al-Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, h. 12

Lembaga *Wilayah al-Hisbah* masih tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meski dinamakan berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya, provinsi-provinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanaannya disebut al- Muhtasib, di Afrika Utara disebut Shahib al-Suq, di Turki disebut Muhtasib Aghasi dan di India disebut Kotwal.<sup>60</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa *Wilayah al-Hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

### 3. Syarat-Syarat *al-Muhtasib*

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap muslim berhak melakukan amar ma'ruf nahi munkar (*al-Hisbah*) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas *al-Hisbah* (*al-Muhtasib*). Hal ini telah dijelaskan di dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu:

- a. Kewajiban *al-Hisbah* bagi *al-Muhtasib* adalah fardlu 'ain, sedang untuk orang lain fardlu kifayah.
- b. Sesungguhnya *al-Muhtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.
- c. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.

---

<sup>60</sup> Ibnu Taimiyah, *op.cit*, h. 12

d. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas Negara) karena tugas *al-Hisbah* dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki *al-Muhtasib* agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.<sup>61</sup>

Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa *al-Muhtasib* adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan, dan status sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas *al-Muhtasib*, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting.<sup>62</sup>

Ada beberapa syarat bagi *al-Muhtasib* yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

- a. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (sekali pun telah mumayyiz), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai *al-Muhtasib*.
- b. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya sehingga *al-Muhtasib*

---

<sup>61</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, *op cit*, h. 399 lihat juga dalam Muhammad Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet.ke-1, h. 278

<sup>62</sup> Ibnu Taimiyah, *op cit*, h. 13



tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran *al-Hisbah*.

- c. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemungkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah ditetapkan dalam nash atau hasil ijtihad ulama' fiqh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama' fiqh di atas, ada pula syarat yang diperselisihkan. Misalnya, *al-Muhtasib* harus laki-laki, sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama' fiqh madzhab Syafi'i dan Hambali. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh jumhur ulama' karena larangan menjabat bagi wanita dalam syari'at Islam hanya terkait dengan jabatan kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada perbuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa' (seorang wanita) sebagai petugas *al-Muhtasib* untuk mengamati tingkah laku para pedagang di pasar Madinah.<sup>63</sup>

#### 4. Tugas Wilayah *Al-Hisbah*

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.

---

<sup>63</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1941

Terkadang Muhtasib ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.<sup>64</sup>

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>65</sup>

*Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan

---

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 96

<sup>65</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, h. 235-249, lihat juga dalam A. Rahmad Rosyadi & M. Rais Ahmad, *op cit*, h. 63

barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.<sup>66</sup>

Jadi *Wilayah al-Hisbah* setiap hari kerjanya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari pehatiannya. *Wilayah al-Hisbah* adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

##### 5. Wewenang *Wilayah Al-Hisbah*

Di samping *Wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-Hisbah dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara,

---

<sup>66</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit*, h. 99

dan pengusiran dari kota. *al- Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>67</sup>

Namun demikian seorang *al-Muhtasib* tida hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tida mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama' fiqh, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>68</sup>

Fungsi pengawasan yang di miliki Panwaslu sama juga dengan lembaga *Al-Hisbah*, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Sistem Tata Negara Islam, akan tetapi Panwaslu hanya menegakan hukum dalam pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada Panwaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan dalam pemilihan umum.

---

<sup>67</sup> Ibnu Taimiyah, *op cit*, h. 14

<sup>68</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op cit*, h. 1941

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelewengan Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi masyarakat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek-praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu yang akan di capai. Jika pemilu dimenangkan melalui cara-cara curang maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diparlemen merupakan wakil-wakil rakyat.

Pelaksanaan pemilu pada tanggal 09 April 2009 merupakan suatu hal penting menyangkut masa depan bangsa indonesia kedepan meskipun banyak yang mengatkan bahwa pemilu legislatif 2009 pemilu terburuk setelah reformasi karena banyak kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pemilu 09 April 2009 didasarkan kepada UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Meskipun benar bahwa Undang-undang telah menegaskan keberadaan panwaslu namun pengawas dari pihak-pihak lain secara eksternal

sangat diperlukan. Pemantauan pemilu, warga masyarakat yang berhak memilih, serta peserta pemilu bakal menjadi mitra penting dalam pengawasan karena dari merekalah laporan-laporan pelanggaran akan diterima oleh pengawas pemilu juga haruslah dipahami bahwa sebenarnya pengawas pemilu sendiri menjadi semacam alur input, proses dan output.

Pengawas pemilu tidak menyelesaikan seluruh input yang diterima berupa laporan atau temuan pelanggaran. Pengawas pemilu menjadi seperti pintu gerbang bagi laporan-laporan serta temuan pelanggaran yang akan diproses melalui suatu pengkajian. Semakin lengkap lapor yang diberikan oleh para pelapor maka akan semakin cepat penentuan jenis pelanggaran serta tindak lanjutnya.

Dari hasil kerja Panwaslu tersebut kemudian akan mengalir pelanggaran administratif ke Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya diselesaikan oleh komisi ini serta tindak pidana pemilu ke penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani guna diteruskan atau tidak ke penuntut umum dan kemudian akan diteruskan ke Pengadilan.

Rangkaian proses ini mestilah dipahami masyarakat sehingga semua harapan pengawasan tidak tertumpu kepada panwaslu. Semua pihak dapat mencermati, mengkritisi, memantau dan ikut serta dalam upaya pengawasan dengan perannya masing-masing. Dengan demikian proses keberhasilan pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab kita semua.

Sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa panwaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu meliputi wilayah

kerjanya yang mencakup kegiatan-kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan, kampanye di tingkat kecamatan, pemungutan dan penghitungan suara disetiap tingkat mulai dari Tempat Pemilihan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

**1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;**

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahapan pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa kegiatan berikut.

**TABEL IV. 1**

**Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	4	3.48
2	Baik	20	17.39
3	Kurang Baik	37	32.17
4	Tidak Baik	23	20.00
5	Tidak Tahu	31	26.96
Jumlah		115	100%

Dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sangatlah penting dalam pemilihan umum karena dalam proses ini sangat rawan dengan penyelewengan yang dilakukan penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 4 orang (3.48 %) responden mengatakan sangat baik dan 20 orang (17.39 %) responden mengatakan baik, 37 orang (32.17 %) kurang baik, 23 orang (20.00 %) mengatakan tidak baik dan 31 orang (26.96 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Wawancara penulis dengan ketua RT 01 RW 05 Desa Kelapapati mengatakan bahwa dalam pemuktahiran data pemilih saya tidak pernah mengetahui tentang pengawasan yang dilakukan Panwaslu kami sebagai perangkat desa memberikan laporan data pemilih ke pemerintahan Desa, akan tetapi banyak warga disini yang tidak memilih pada hal kita sudah berikan daftar warga yang berhak memilih ke pemerintahan Desa.<sup>70</sup>

ketua DPC-PKS Kecamatan mengatakan lemahnya pengawsan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bengkalis menyebabkan banyaknya warga yang mempunyai hak pilih tidak dapat memilih pada hal secara undang-undang pemilu warga tersebut telah memenuhi syarat untuk memilih.<sup>71</sup>

Kemudian tidak adanya sosialisasi yang dilakukan panwaslu kecamatan bengkalis dalam mengawasi pemuktahiran data pemilih ke

---

<sup>70</sup> Ketua RT 01 RW 05 Desa Kelapapati, *Wawancara*, Bengkalis, Hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2010.

<sup>71</sup> Peserta Pemilu dan Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera, *wawancara*, Bengkalis, hari Rabu tanggal 14 April 2010



desa/kelurahan yang mengakibatkan banyak pemilih yang tidak bisa memilih.

Dapat penulis simpulkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu dalam mengawasi pemukhtahiran data pemilih mengakibatkan banyak masyarakat yang berhak memilih tidak terdata dalam daftar pemilih sementara yang akan jadi pedoman dalam penetapan daftar pemilih tetap.

**TABEL IV. 2**  
**Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pada Kegiatan**  
**Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	4	3.48
2	Baik	20	17.39
3	Kurang Baik	37	32.17
4	Tidak Baik	23	20.00
5	Tidak Tahu	31	26.96
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 4 orang (3.48 %) responden mengatakan sangat baik dan 20 orang (17.39 %) responden mengatakan baik, 37 orang (32.17 %) kurang baik, 23 orang (20.00 %) mengatakan tidak baik dan 31 orang (26.96 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Pada Kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang panitia pengawas lapangan mengatakan bahwa panitia pengawas lapangan tidak ada melakukan pengawasan pada tahapan ini karena tahapan baik pada pemukhtahiran data pemilih sementara maupun pemukhahiran data pemilih tetap kami sebagai panitia pengawas lapangan di Kecamatan Bengkalis belum dilantik. Pada hal tahapan ini sangatlah penting dalam pemilu, karena ini merupakan hak dari pada seluruh warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memilih<sup>72</sup>.

**TABEL IV. 3**

**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Kegiatan Penyampaian Kartu Pemilih Kepada Pemilih di Kecamatan Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	5	4.35
2	Baik	34	29.56
3	Kurang Baik	33	28.70
4	Tidak Baik	17	14.78
5	Tidak Tahu	26	22.61
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 5 orang (4.35 %) responden mengatakan sangat baik dan 34 orang (29.56 %) responden mengatakan baik, 33 orang (28.70 %) kurang baik, 17 orang (14.78 %) mengatakan tidak baik dan 26 orang (22.61 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

---

<sup>72</sup> Anggota Panitia Pengawas Lapangan, wawancara, Bengkalis, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010

Legislatif 2009 Pada Pada Kegiatan Penyampaian Kartu Pemilih Kepada Pemilih di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Wawancara dengan sekretaris RT 02 RW 05 Desa Wonosari mengatakan penyampaian kartu pemilih dilaksanakan dua hari sebelum hari pemilihan dan saat itu saya sebagai petugas dalam penyampaian kartu pemilih di RT 02 RW 05 Desa Wonosari dalam penyampaian kartun pemilih tidak ditemukan anggota Panwaslu yang mengawasi kegiatan tersebut, dan pada saat penyampaian kartu pemilih ada yang saya temukan warga yang tidak berhak memilih dapat kartu pemilih seperti anggota Polri dan warga yang berhak memilih tidak dapat kartu pemilih.<sup>73</sup>

Lemahnya pengawasan pada penyampaian kartu pemilih juga mengakibatkan banyak pemilih yang tidak bisa memilih tahapan penyampaian kartu pemilih bersamaan dengan undangan untuk memilih, banyak masyarakat yang memiliki hak suara tidak dapat memilih karena tidak dapat kartu pemilih dan undangan memilih pada hari "H". Ini di akibatkan lemahnya pengawasan pada tahapan pemukhtahiran data pemilih dan penyampaian kartu pemilih.

Dari hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Kec. Bengkalis mengatakan ada beberapa laporan masyarakat mengenai tidak terdaftarnya sebagai pemilih padahal mereka merupakan penduduk Kecamatan

---

<sup>73</sup> Sekretaris RT 02 RW 05 Desa Wonosari, *Wawancara*, Bengkalis, Hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010.

Bengkalis yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk kecamatan Bengkalis Akan tetapi hal ini sudah disampaikan ke KPU.<sup>74</sup>

Artinya lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Panwaslu Kec. Bengkalis membuat masyarakat yang seharusnya dapat memilih akan tetapi pada penyampaian kartu pemilih mereka tidak dapat kartu pemilih dan undangan untuk memilih.

## **2. Pengawasan dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kampanye partai politik peserta pemilu dan atau calon anggota DPR dan DPRD dilakukan untuk meyakinkan para pemilih bukan anggota untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan program-program partai. Sedangkan Kampanye Peserta Pemilu perseorangan atau calon anggota DPD dilakukan untuk meyakinkan para pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan program-program, visi dan misi calon tersebut.

Dalam kampanye materi yang disampaikan berisi visi, misi dan program-program peserta pemilu. Adapun materi kampanye tersebut meliputi agenda kegiatan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya. Dalam penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara:

---

<sup>74</sup> Ketua Panwaslu Kec. Bengkalis, wawancara, Bengkalis, tanggal 17 April 2010

- a. Sopan yaitu tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, cabul atau yang oleh masyarakat setempat dianggap tidak pantas disampaikan didepan publik.
- b. Tertib, tidak menggaanggu kepentingan publik.
- c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih.

Dalam kampanye ini juga rakyat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam dan atau menghadiri kampanye pemilihan umum dan partai politik peserta pemilu mempunyai hak dan kesempatan yang sama melakukan kampanye diseluruh wilayah indonesia begitu juga peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Dalam mengadakan kampanye peserta pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lainnya.
- c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
- d. Mengganggu ketertiban umum.
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu lainnya.

- f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Dalam mengadakan pengawasan terhadap kampanye ditingkat Kecamatan Panwaslu mengadakan pengawasan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilaksanakan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui tugas Panwaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL IV. 4**  
**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Pelaksanaan Kampanye di**  
**Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	9	7.83
2	Baik	21	18.26
3	Kurang Baik	25	21.74
4	Tidak Baik	29	25.22
5	Tidak Tahu	31	26.95
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 9 orang (7.83 %) responden mengatakan sangat baik dan 21 orang (18.26 %) responden mengatakan baik, 25 orang (21.74 %) kurang baik, 29 orang (25.22 %)

mengatakan tidak baik dan 31 orang (26.95 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Pada Kegiatan pengawasan pelaksanaan kampanye di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Hasil wawancara dengan ketua DPC-PKS Kec. Bengkalis mengatakan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu akan tetap tidak di tindaklanjuti dan banyak laporan yang sudah mereka laporkan ke Panwaslu Kec. Bengkalis misalnya laporan pengrusakan alat peraga kampanye PKS dengan nomor surat 103/S/DPC-  
PKS/BKS/II/1430H prihal pengaduan pengrusakan atribut juga tidak di tindaklanjuti oleh Panwaslu, Kampaye yang dilakukan oleh salah seorang kandidat dari Partai Golongan Karya untuk DPRD Propinsi yang telah melakukan kampanye di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bengkalis, padahal kasus ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kec. Bengkalis dengan alat bukti video rekaman ketika kandidat tersebut melakukan kampanye dilingkungan pedidikan yang nyata-nyatanya sudah diatur di dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana pemilu<sup>75</sup>.

Begitu juga wawancara dengan wakil sekretarsi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bengkalis mengatakan banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam kampanye dan kita sudah laporkan ini ke Panwaslu Kec.Bengkalis namum sampai saat ini laporan yang kita berikan tidak ada tindak lanjut sama sekali oleh panwaslu

---

<sup>75</sup> Ketua DPC-PKS Kecamatan Bengkalis, *wawancara*, Bengkalis, tanggal 14 April 2010

misalnya saja pengrusakan atribut kampanye yang saya laporkan pada hari selasa tanggal 24 Februari 2009 begitu juga dengan laporan yang kita sampaikan tentang pelibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye terbuka yang dilakukan beberapa partai politik seperti: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang telah kita Laporkan karena dalam kampanye terbuka melibatkan anak-anak di bawah umur merupakan tindak pidana pemilu juga tidak mendapat follow up yang jelas, menurutnya laporan yang kita laporkan hanya sebatas laporan dan tidak ada tindaklanjutnya sama sekali<sup>76</sup>.

Wawancara dengan sekretaris RT 02 RW 05 Desa Wonosari pada saat kampanye seharusnya Panwaslu harus maksimal dalam mengawasi karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye banyak cara yang dilakukan Caleg (calon Legislatif) untuk mengenalkan dirinya ke masyarakat padahal cara yang digunakan salah misalnya banyak Caleg yang ceramah pada saat pengajian di Masjid, Mushalla, Surau dan tempat-tempat ibadah lainnya akan tetapi setelah memberikan ceramah ia membagi-bagikan kartu namanya dan menyarakan untuk memilihnya ditempat-tempat ibadah tersebut, ini merupakan pelanggaran kampanye.

Dari wawancara peneliti dengan Ketua Panwaslu Kec. Bengkalis bahwa ada beberapa kasus yang telah masuk ke Panwaslu Kec. Bengkalis

---

<sup>76</sup> Wakil Sekretaris DPC-PKB Kabupaten Bengkalis), wawancara, Bengkalis, tanggal 15 April 2010



seperti kampanye yang dilakukan oleh salah satu kandidat dari Partai Golkar untuk DPRD Propinsi Riau yang telah melakukan kampanye di dalam kampus STAI Bengkalis, Itu tidak bisa kita teruskan karena laporan yang kita terima itu sudah kadaluarsa dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2008 menyebutkan laporan dapat ditindaklanjuti sebelum tiga hari setelah kejadian akan tetapi laporan yang kami terima sudah lewat tiga hari dari hari kejadian makanya kami tidak bisa meneruskan laporan tersebut ke pihak yang berwenang.

Kemudian penulis menanyakan masalah pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan Caleg dari partai Golkar tersebut didalam kampus STAI Bengkalis apakah ini juga harus berdasarkan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan masalah waktu pelaporan padahal atribut tersebut sudah lama terpasang dan Panwaslu Kec. Bengkalis bisa saja melihat dan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang, dan untuk kasus ini ketua Panwaslu Kec. Bengkalis tidak bisa menjawab permasalahan tersebut.

Dapat penulis simpulkan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, ini dapat penulis simpulkan dari hasil angket dan wawancara dengan responden.

b. Pengawasan pada masa tenang

Masa tenang merupakan kegiatan yang dilarang dalam melakukan kampanye setelah diadakannya pelaksanaan kampanye. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Panwaslu pada masa tenang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL IV. 5**  
**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Masa Tenang di**  
**Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	7	6.09
2	Baik	29	25.22
3	Kurang Baik	31	26.95
4	Tidak Baik	22	19.13
5	Tidak Tahu	26	22.61
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 7 orang (6.09 %) responden mengatakan sangat baik dan 29 orang (25.22 %) responden mengatakan baik, 31 orang (26.95 %) kurang baik, 22 orang (19.13 %) mengatakan tidak baik dan 26 orang (22.61 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Pada Kegiatan pengawasan masa tenang di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengawas masa tenang memang masa ini sangat rawan dengan money politik (Politik Uang) banyak peserta pemilu melakukan

”serangan Fajar” dengan uang untuk menang dalam pemilihan umum. Dari hasil wawancara dengan ketua panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bengkalis banyak laporan yang di terima dari masyarakat dalam akan tetapi masa tenang hanya tiga hari sebelum pemungutan suara dan ”serangan fajar” banyak dilakukan 1 hari sebelum atau pada malam sebelum hari pemungutan yang dilakukan tim sukses dari masing-masing peserta pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri dan laporan yang kami terima setelah proses pemungutan suara selesai ini yang menyebabkan susah untuk di tindak lanjuti ke pihak yang berwenang.

Dapat penulis simpulkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bengkalis pada masa tenang kurang berjalan secara maksimal ini dapat penulis simpulkan dari hasil angket dan wawancara penulis dengan responden.

### **3. Pengawasan dalam Kegiatan Perlengkapan Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya.**

#### **a. Pengawasan Perlengkapan Pemilu**

Pengawasan Perlengkapan Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi segala perlengkapan pemilu termasuk perlengkapan akomodasi maupun surat suara. Untuk mengetahui Pengawasan Perlengkapan Pemilu oleh Panwaslu dapat dilihat pada tabel berikut ini lihat tabel sebelah.

**Tabel IV. 6**  
**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Perlengkapan Pemilihan**  
**Umum di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	5	4.35
2	Baik	28	24.35
3	Kurang Baik	27	23.48
4	Tidak Baik	20	17.39
5	Tidak Tahu	35	30.43
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 5 orang (4.35 %) responden mengatakan sangat baik dan 28 orang (24.35 %) responden mengatakan baik, 27 orang (23.48 %) kurang baik, 17 orang (17.39 %) mengatakan tidak baik dan 35 orang (30.43 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Kegiatan perlengkapan pemilu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

b. Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum

**TABEL IV. 7**  
**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Pendistribusian**  
**Perlengkapan Pemilihan Umum di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	4	3.48
2	Baik	36	31.30
3	Kurang Baik	31	26.96
4	Tidak Baik	17	14.78
5	Tidak Tahu	27	23.48
Jumlah		115	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 4 orang (3.48 %) responden mengatakan sangat baik dan 36 orang (31.30 %) responden mengatakan baik, 31 orang (26.96 %) kurang baik, 17 orang (14.78 %) mengatakan tidak baik dan 27 orang (23.48 %) mengatakan tidak tahu dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Kegiatan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Wawancara dengan ketua RW 03 Desa Pedekik ia mengatakan perlengkapan pemilu yang digunakan pada saat pemilihan dilingkungan RW kita terima satu hari sebelum pemilihan dan tidak ada sama sekali pihak-pihak yang berwenang seperti Panwaslu mengawasi perlengkapan pemilu tersebut artinya lemahnya pengawasan memberikan celah kepada

penyelenggara pemilu untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu.<sup>77</sup>

#### 4. Pengawasan Pada Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara

**TABEL IV. 8**  
**Tanggapan Responden Pada Pengawasan Pemungutan dan**  
**Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Baik	9	7.83
2	Baik	32	27.83
3	Kurang Baik	35	30.43
4	Tidak Baik	13	11.30
5	Tidak Tahu	26	22.61
Jumlah		115	100%

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sangat penting karena tahapan ini sangat menentukan siapa yang akan menang dalam pemilihan umum, tahapan ini sangatlah rawan dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan panitia pemungutan suara baik yang berada di TPS maupun PPS, proses pemungutan suara dilakukan di masing TPS yang ada di Kecamatan Bengkalis haruslah diawasi sebaik-baik mungkin Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 9 orang (7.83 %) responden mengatakan sangat baik dan 32 orang (27.83 %) responden mengatakan baik, 35 orang (30.43 %) kurang baik, 13 orang (11.30 %) mengatakan tidak baik dan 26 orang (22.61 %) mengatakan tidak tahu dengan

---

<sup>77</sup> Ketua RW 03 Desa Pedekik, *Wawancara*, Bengkalis, pada Hari Rabu Minggu tanggal 27 Juni 2010.

pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 mengatakan tidak baik dengan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Pada Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang panitia pengawas lapangan kelurahan Damon dalam pengawasan yang ia tidak bisa maksimal karena di Kelurahan Damon masih kentalnya ”premanisme” sehingga ia tidak bisa mengawasi secara maksimal dan banyaknya ancaman yang ia terima dalam mengawasi proses pemungutan tersebut. Kendala kita dalam mengawasi juga persoalan kurangnya anggota dalam mengawasi proses ini karena dalam mengawasi satu desa atau kelurahan yang memiliki teritorial yang luas dan memiliki TPS yang cukup banyak juga menyebabkan tidak bisa maksimal melakukan kerja-kerja yang kita lakukan.

Dari hasil wawancara dengan ketua PAC PPNUI Kec. Bengkalis mengatakan hal yang senada kurang seriusnya Panwaslu mengawasi pemilihan umum telah mencederai arti demokrasi dalam pemilihan umum, yang seharusnya pemilihan umum itu harus dari keinginan rakyat akan tetapi banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari struktur KPU maupun partai politik yang ada mengakibatkan ketimpangan dalam proses pemilihan umum tersebut, dan pemimpin yang akan duduk

nantinya bukanlah orang-orang yang lahir dari keinginan rakyat tetapi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum<sup>78</sup>.

Dalam penghitungan suara dari TPS-TPS ke PPS yang dilakukan dimasing-masing desa/kelurahan juga tidak maksimal karena dari beberapa wawancara dengan Panwas lapangan di Kecamatan Bengkalis proses pergerakan suara dari masing-masing TPS menuju Ke PPS tidak bisa di pantau oleh satu orang anggota karena selain persoalan banyaknya TPS juga masalah teritorial yang berjauhan menjadi kendala dalam mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS menuju PPS.

Pengawasan dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu bersih, bebas, jujur dan adil akan tetapi dari hasil penelitian penulis Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tidak berjalan secara maksimal. Dari hasil angket dan wawancara dengan responden banyak yang mengatakan lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu dalam mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu berdampak terhadap hasil dari pada pemilu tersebut. Seharusnya pemilu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dalam memilih pemimpin.

Dalam penegakan hukum pemilu Panwaslu harus berlaku adil kepada seluruh peserta pemilu baik kepada partai-partai maupun perseorangan yang ikut dalam pemilu tersebut, salah satu amanat dalam UU No.22 tahun 2007 adalah Panwaslu harus bersikap tidak deskriminatif

---

<sup>78</sup>Ketua PAC-PPNUI (Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia) Kecamatan Bengkalis. Wawancara, Bengkalis tanggal 16 April 2010.



dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan tetapi Panwaslu Kecamatan Bengkalis tidak menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum banyak faktor yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan Bengkalis tidak berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat yang akan peneliti paparkan pada tabel di bawah ini.

Untuk mengetahui apakah terbatas dana yang disediakan negara menghambat Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL IV. 9**  
**Tanggapan Responden Terhadap Terbatasnya Dana Yang Di Sediakan Negara Menghambat Panwaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Menghambat	26	22.26
2	Menghambat	47	40.87
3	Kurang Menghambat	18	15.65
4	Tidak Menghambat	9	7.82
5	Tidak Tahu	15	13.04
Jumlah		115	100%

Dalam hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa terbatasnya dana yang di sediakan Negara untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 di kecamatan bengkalis dapat disimpulkan 26 orang (22.62%) responden mengatakan sangat menghambat dan 47 orang (40.87%) responden mengatakan menghambat dan 18 orang (15.65%) responden mengatakan kurang menghambat 9 orang (7.82 %) responden tidak menghambat dan 15 orang (13.04%) responden mengatakan tidak tahu dengan terbatasnya dana yang di sediakan Negara sangat menghambat Panwaslu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Kecamatan Bengkalis, ia mengatakan dalam pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu butuh dana untuk operasional Panwaslu Kecamatan dan Panwas Lapangan.<sup>79</sup>

Seharusnya dana yang disediakan Negara harus mencukupi dari seluruh kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilu agar pengawasan pemilu dapat teralisasi dengan baik.

Dapat penulis simpulkan bahwa terbatasnya dana yang disediakan Negara kepada Panwaslu Kecamatan Bengkalis menghambat Pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Bengkalis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu legislative di Kecamatan Bengkalis

---

<sup>79</sup> Ketua Panwaslu Kec. Bengkalis, wawancara, Kec. Bengakalis, tanggal 17 April 2010

Untuk mengetahui apakah terbatas Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki anggota Panwaslu menghambat Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL IV. 10**  
**Tanggapan Responden Terhadap Terbatas Sumber Daya Manusia Yang**  
**Yang Dimiliki Anggota Panwaslu Mempengaruhi Dalam Mengawasi**  
**Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Menghambat	19	16.52
2	Menghambat	37	32.17
3	Kurang Menghambat	23	20.00
4	Tidak Menghambat	13	11.30
5	Tidak Tahu	23	20.00
Jumlah		115	100%

Permasalahan Sumber Daya Manusia juga merupakan hal yang mendasar, karena dibutuhkan orang-orang yang terampil dan memahami karakteristik laporan pelanggaran, sehingga para anggota Panwas Pemilu bisa bekerja secara optimal dengan dibantu oleh para stafnya yang mengerti akan permasalahan Pemilu.

Dalam hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki anggota Panwaslu Kecamatan Bengkalis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis 19 orang (16.52%) responden mengatakan sangat menghambat, 37 orang (32.17%) responden mengatakan menghambat dan 23 orang (20.00%)

responden mengatakan kurang menghambat, 13 orang (11.30 %) responden tidak menghambat dan 23 orang (20.00%) responden mengatakan tidak tahu dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Bengkalis maupun panitia pengawas lapangan yang ada di Kecamatan Bengkalis membuat tidak maksimalnya kerja-kerja yang panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Pengawas Pemilu merupakan salah satu institusi penegak hukum dalam pemilu. oleh karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu dari pusat hingga kecamatan harus memahami dan mengerti seluruh materi dan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu karena materi dan perundang-undangan itulah yang harus dijaga dan ditegakkan oleh pengawas pemilu agar pemilu terlaksana secara demokratis, jujur dan adil.

Dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki anggota Panwaslu dan Panwas lapangan di Kecamatan Bengkalis mempengaruhi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Bengkalis.

Untuk mengetahui apakah Intervensi Dari Pihak-Pihak Tertentu menghambat Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lihat tabel sebelah.

**TABEL 1V. 11**  
**Tanggapan Responden Terhadap intervensi dari pihak-pihak tertentu**  
**Menghambat pelaksanaan tugas Panwaslu dalam mengawasi pemilu**  
**legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Menghambat	16	13.91
2	Menghambat	30	26.10
3	Kurang Menghambat	21	18.26
4	Tidak Menghambat	12	10.43
5	Tidak Tahu	36	31.30
Jumlah		115	100%

Dalam hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap Panwaslu Kecamatan Bengkalis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 di kecamatan bengkalis dapat disimpulkan 16 orang (13.91%) responden mengatakan sangat menghambat, 30 orang (26.10%) responden mengatakan menghambat dan 21 orang (18.26%) responden mengatakan kurang menghambat, 12 orang (10.43%) responden tidak menghambat dan 36 orang (31.30%) responden mengatakan tidak tahu dengan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Bengkalis mengenai adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang membuat tidak independen Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam penegakan hukum pemilu terbukti dengan tidak adanya sanksi hukum yang diterapkan kepada pelanggar hukum, padahal laporan-laporan tentang pelanggaran baik menyangkut pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilu yang

telah dilaporkan oleh masyarakat, partai politik maupun peserta pemilu dan yang lainnya tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa karena adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu menghambat pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Bengkalis.

### **C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis**

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat, menolak bahaya serta memudahkan umat manusia membuat sistem sendiri dengan jalan musyawarah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar dengan adanya aturan yang dibuat dapat ditaati dan tidak melanggar undang-undang, firman Allah dalam surat as- Sy ra ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka

*menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.*<sup>80</sup>

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu legislatif di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2009 tidak lepas dari keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai salah satu lembaga pengawasan yang memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bengkalis, sesuai dengan amanat yang telah tertuang di dalam UU No. 10 Tahun 2008 BAB II pasal 4 ayat 2, tentang tahapan penyelenggaraan pemilu dan Pasal 81 Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Panwaslu di kategorikan kedalam aktivitas *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, agar dalam pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, Pemilu ketiga di era Reformasi tahun 2009 dimaksudkan untuk semakin memantapkan sebagai negara yang demokratis. Selain membenahi kekurangan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2009 telah merevisi produk Pemilu sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar Pemilu benar-benar menghasilkan pimpinan politik yang berkualitas, mengefektifkan

---

<sup>80</sup> Departemen Agama, *op cit*, h. 487

kepemimpinan, mampu menata pemerintahan agar semakin baik, sekaligus dapat menciptakan kehidupan bernegara yang lebih bermartabat dan berkeadilan sosial.

Bagi Panwaslu hal di atas merupakan tantangan dan tugas yang harus dapat dicarikan solusinya. Pertama-tama bahwa independensi penilaian kinerja pengawas Pemilu kerap kali ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Seperti dimaktub dalam seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, tugas pengawas Pemilu adalah rekomendatif dan imperatif. Maksudnya, bahwa setelah pintu pertama pengaduan dan/atau laporan diterima pengawas, berikutnya adalah menindaklanjuti kepada penyelenggara Pemilu (KPU) untuk kasus pelanggaran administrasi Pemilu, menindaklanjutinya kepada lembaga penyidik untuk kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu, serta kasus-kasus di luar baik administrasi maupun pidana Pemilu kepada instansi yang berwenang. Lebih jauh lagi, peraturan Perundang-undangan Pemilu mengharuskan Pengawas Pemilu mengawasi bagaimana rekomendasi tersebut dijalankan bahkan apabila tidak dijalankan maka rekomendasi sanksi berbentuk pidana pun dapat diberlakukan.

Mengingat peran strategis yang harus dilakukan oleh Bawaslu atau Panwaslu maka dibentuk UU No. 22 tahun 2007 yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk di tingkat Pusat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan harapan agar fungsi pengawasan dan



kontribusi penegakan hukum pada Pemilu selanjutnya dapat dijalankan secara lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Dalam Hukum Tata Negara Islam juga mengenal tentang lembaga yang bertugas menegakan hukum yang menyeru kepada *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran seperti lembaga *al-Hisbah*, *al-Hisbah* merupakan lembaga memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.<sup>81</sup>

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih

---

<sup>81</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997) hal. 96

ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>82</sup>

Dengan demikian tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang lingkupnya, sebab Panwaslu Kecamatan Bengkalis merupakan bagian dari pada kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi peserta pemilu dan seluruh rakyat harus mentaati Panwaslu Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, karena panwaslu merupakan bagian dari *Wil yah al-Hisbah*, sedangkan menaati *Wil yah al-Hisbah* itu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nis ' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. ke-3, h. 78

<sup>83</sup> Departemen Agama, *op cit*, h. 87

Selain itu, anggota Panwaslu yang juga bagian dari yang dipercaya masyarakat dan mengatur jalannya pemilu, merupakan kewajiban yang menantang dan berat, membebani bagi para pengemban amanah dengan sejumlah tugas dan kewajibannya. Pemimpin panwaslu juga diharuskan untuk menjaga anggota kelompoknya, mengawasi, dan memegang tanggung jawab legal bukan saja atas tindakannya sendiri, tetapi juga seluruh kegiatan kelompok. Ia harus menjamin bahwa kemanfaatan bagi seluruh anggota adalah merupakan cita-cita tertinggi.

Akan tetapi dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis banyak pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak di proses secara hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, dapat penulis simpulkan ini akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu sebagai salah satu instansi penegak hukum pemilu yang telah di amanatkan di dalam Undang-undang. Jadi dari hasil penelitian penulis Panwaslu Kecamatan Bengkalis tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang telah diamanatkan. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”<sup>84</sup>

Dalam ayat Al-Anfal ayat 27 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”<sup>85</sup>

Dalam ayat-ayat di atas, Allah SWT bahwa sesungguhnya amanat itu haruslah ditunaikan dan jangan sampai ada pengkhianatan atasnya. Rasa tanggungjawab yang tinggi untuk menunaikan amanat, karena itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang memberi amanah dan orang yang diberi amanah haruslah paham dan mengerti akan tugas dan tanggungjawab masing-masing agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sukses dan selamat dunia akhirat. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia dapat mengaktualisasikan hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya

---

<sup>84</sup> Departemen Agama, *op cit*, h.

<sup>85</sup> *Ibid*, h.

hukum Tuhan dalam membangun kemakmuran di muka bumi. Untuk itu, Al-Quran menunjukkan jalan :

1. Agar manusia mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahnya (*al-adl*).
2. Mewujudkan kebajikan dengan tegaknya hukum (*al-Ihsan*).
3. Memelihara dan memenuhi hak-hak kemasyarakatan dan pribadi yang dilindungi (*al-Qisth*); dan pada saat yang sama, agar manusia memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian (*al-Fahisyat*), kemungkaran (*al-munkar*), dan kesewenang-wenangan (*al-baghy*). Dalam kaitan ini diperlukan sebuah system politik sebagai sarana dan wahana.
4. Jabatan yang diemban oleh seseorang adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Jabatan bagaikan pisau bermata dua, satu sisi bisa mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan, tapi pada sisi yang lain bisa saja menghantarkan kepada kesengsaraan dan penderitaan. Jabatan hendaknya dimaknai sebagai amanah yang berat untuk dipikul dan karenanya pribadi yang diamanahi haruslah betul-betul memenuhi kriteria yang diharapkan, jangan hanya sekedar bermodal *keinginan* tapi harus juga diimbangi dengan *kemampuan*. Anggapan bahwa jabatan identik dengan berbagai fasilitas duniawi yang menggiurkan haruslah juga diimbangi dengan beratnya beban amanah yang harus

dipertanggungjawabkan kelak, tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2009 tinjauan fiqih siyasah penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bengkalis tidak berjalan secara maksimal ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, seharusnya lembaga ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang bersifat tindak pidana pemilu di kecamatan Bengkalis, akibatnya banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi tidak di tindak lanjuti dan menghasilkan pemilu yang tidak demokratis karena penuh dengan kecurangan. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Bengkalis membuat penulis menyimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bengkalis tidak menjalankan tugas dan wewenang yang telah di amanatkan undang-undang.
2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tidak maksimalnya kerja panitia pengawas pemilihan umum legislatif kecamatan bengkalis adalah:
  - a. terbatasnya dana yang disediakan Negara

- b. terbatasnya skil atau keahlian yang dimiliki anggota Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam penegakkan hukum pemilu.
  - c. adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu kepada panwaslu kecamatan Bengkalis dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga panwaslu kecamatan Bengkalis tidak independent
3. Tinjauan fiqh siy sah terhadap tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan Bengkalis mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar ma'r f nahi munkar. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan Wil yah al-Hisbah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli fiqh siy sah, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

## **B. Saran**

Kemandirian penyelenggara pemilu juga harus tecermin dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabannya. Penyelenggara pemilu, baik KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di masa mendatang, kita menghendaki peningkatan kualitas demokrasi yang mengarah pada terwujudnya demokrasi secara substansial. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan



kemandirian penyelenggara pemilu guna terselenggaranya pemilu yang memenuhi asas luber dan jurdil.

Dengan adanya ketentuan yang telah mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis agar tidak terjadi lagi pelanggaran, maka Panwaslu Kecamatan Bengkalis harus lebih berperan untuk menjaga kemaslahatan dan harus lebih berani dalam menindak dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pidana maupun administratif dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undang. Semoga menjadi nilai lebih bagi Panwaslu Kecamatan Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama R.I, (Jakarta: Nahdalana, 2004), cet. ke-1
- Al-Buraey, Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. ke-1
- al-Jabiri Abid, Muhammad, *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996), cet. ke-2
- A. K. Muda, Ahmad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Reality Publisher: 2006), cet. ke-2
- ash-Shiddieqy Muhammad, Hasbi, Teungku, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Azka, Abu, Terjemahan, *Syarah 40 Hadits Tentang Ahlak*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2003)
- Bahri, Zainul, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, (Bandung, Angkasa: 1996), cet. ke-1
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Hadiningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1985), cet. ke-1
- Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Jindan Ibrahim, Khalid, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. ke-3
- Kusuma W, Mulayana, Dihimpun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, (Jakarta: Opsi Consultant DAN 7 (Seven) Strategic Studies, 2008)
- Moekijat, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), cet. ke-1,
- Panitia pengawas Pemilu, *Buku Saku Pedoman Operasional Pengawas Pemilu 2004*, (Jakarta, 2004), tidak dipublikasikan

Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2006), cet. ke-2

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), cet. ke-4

Rais Dhiauddin, M, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet. ke-4

Rosyadi Rahmat, A, & M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

Santoso Topo dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Taimiyah Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Undang-undang dan Peraturan- Peraturan.

Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2007, *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 *Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 *Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009*

**Sumber-Sumber Lain :**

<http://www.bawaslu.go.id/ProfilBawaslu/SejarahPengawasanPemilu/tabid/93/Default.aspx>, di akses pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010

Jurnal Studi Islam dan Budaya, *Wilayah Al-Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Populasi dan Sampel .....	11
Tabel II.1	: Nama-nama Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bengkalis ....	16
Tabel II.2	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Jenis Kelamin .....	17
Tabel II.3	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Suku dan Etnis .....	17
Tabel II.4	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Mata Pencaharian .....	18
Tabel II.5	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Pendidikan .....	19
Tabel II.6	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Usia .....	20
Tabel II.7	: Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Agama .....	21
Tabel II.8	: Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bengkalis .....	22
Tabel IV.1	: Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Di Kecamatan Bengkalis .....	67
Tabel IV.2	: Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Bengkalis .....	69
Tabel IV.3	: Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Penyampaian Kartu Pemilih Kepada Pemilih di Kecamatan Bengkalis .....	70
Tabel IV.4	: Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye di Kecamatan Bengkalis.....	74
Tabel IV.5	: Distribusi Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Masa Tenang di Kecamatan Bengkalis .....	78

Tabel IV.6 : Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemilihan Umum di Kecamatan Bengkalis .....	80
Tabel IV.7 : Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum di Kecamatan Bengkalis .....	81
Tabel IV.8 : Tanggapan Responden Pada Kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kecamatan Bengkalis .....	82
Tabel IV.9 : Tanggapan Responden Terhadap Terbatasnya Dana Yang Di Sediakan Negara Menghambat Panwaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis .....	85
Tabel IV.10 : Tanggapan Responden Terhadap Terbatas Sumber Daya Manusia Yang Yang Dimiliki Anggota Panwaslu Mempengaruhi Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis .....	87
Tabel IV.11 :Tanggapan Responden Terhadap intervensi dari pihak-pihak tertentu Menghambat pelaksanaan tugas Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis ...	89

## ANGKET

### Identitas Responden

Nama :  
Tempat/ tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat :

### Petunjuk

Pilih salah satu pertanyaan atau jawaban bapak/ibu/saudara,-i anggap sesuai dengan kenyataan, dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu pilihan A,B,C, D, dan E

1. Apakah anda mengerti Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum?
  - a. sangat mengerti
  - b. mengerti
  - c. kurang mengerti
  - d. tidak mengerti
  - e. sangat tidak mengerti
2. Apakah anda mengerti dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah?
  - a. sangat mengerti
  - b. mengerti
  - c. kurang mengerti
  - d. tidak mengerti
  - e. sangat tidak mengerti
3. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

4. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan penetapan daftar pemilih tetap di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Penyampaian kartu pemilih kepada pemilih?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
6. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
7. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pengawasan perlengkapan pemilu di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
8. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilu di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik



9. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan kampanye di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
10. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan masa tenang di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
11. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS di Kecamatan Bengkalis?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
12. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS di Kecamatan Bengkalis?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
13. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pembuatan berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa dan PPS di Kecamatan Bengkalis?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
14. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pergerakan surat suara dari TPS ke PPK di Kecamatan Bengkalis?
  - a. sangat Baik
  - b. baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

15. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS di Kecamatan Bengkalis?
- a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
16. Apakah menurut pendapat anda terbatasnya fasilitas yang di sediakan negara mempengaruhi pelaksanaan tugas Panwaslu dalam legiskatif 2009 di Kecamatan Bengkalis?
- a. Sangat mempengaruhi
  - b. Mempengaruhi
  - c. Kurang mempengaruhi
  - d. Tidak mempengaruhi
  - e. Sangat tidak mempengaruhi
17. Apakah menurut pendapat anda terbatasnya dana yang di sediakan negara mempengaruhi pelaksanaan tugas Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis?
- a. Sangat mempengaruhi
  - b. Mempengaruhi
  - c. Kurang mempengaruhi
  - d. Tidak mempengaruhi
  - e. Sangat tidak mempengaruhi
18. Apakah menurut pendapat anda terbatasnya skil atau keahlian yang dimiliki anggota Panwaslu mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis?
- a. Sangat mempengaruhi
  - b. Mempengaruhi
  - c. Kurang mempengaruhi
  - d. Tidak mempengaruhi
  - e. Sangat tidak mempengaruhi
19. apakah intervensi dari pihak-pihak tertentu mempengaruhi pelaksanaan tugas Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis?
- a. Sangat mempengaruhi
  - b. Mempengaruhi
  - c. Kurang mempengaruhi
  - d. Tidak mempengaruhi
  - e. Sangat tidak mempengaruhi

## **Target Wawancara**

1. Apakah anda mengerti tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu?
2. Apakah anda mengerti Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kecamatan Bengkalis?
4. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan penetapan daftar pemilih tetap di Kecamatan Bengkalis?
5. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Penyampaian kartu pemilih kepada pemilih?
6. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu di Kecamatan Bengkalis?
7. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pengawasan perlengkapan pemilu di Kecamatan Bengkalis?
8. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilu di Kecamatan Bengkalis?
9. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan kampanye di Kecamatan Bengkalis?
10. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan masa tenang di Kecamatan Bengkalis?

11. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS di Kecamatan Bengkalis?
12. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS di Kecamatan Bengkalis?
13. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pembuatan berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa dan PPS di Kecamatan Bengkalis?
14. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan pergerakan surat suara dari TPS ke PPK di Kecamatan Bengkalis?
15. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu pada kegiatan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS di Kecamatan Bengkalis?
16. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai faktor-faktor penghambat Panwaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis?
17. Bagaimana dalam pelaporan pelanggaran pemilu di Kecamatan Bengkalis, dari pihak manakah yang banyak melakukan pelaporan ke Panwaslu?

## BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 13 Juli 1985 dari pasangan Ismail Usman dan Isnaniar anak kedua dari empat bersaudara ini menamatkan jenjang pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 004 Bengkalis (1997)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Bengkalis (2000)
3. Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis (2003)
4. Jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Telekomunikasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2003 – Pindah)
5. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2010)

Penulis juga aktif dalam organisasi Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan diantaranya:

1. Kepala Bidang Kerohanian Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bengkalis / INPERALIS (2006-2008)
2. Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2006-2007).
3. Sekretaris Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Propinsi Riau (2008)